Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)
Vol. 5, No. 4, Januari 2027
E-ISSN:2829-2723
DOI: 10.58540/jipsi.v5i4.2682

STRATEGI KELEMBAGAAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Shaskia Gisandrina[1], Andi Suhardiyanto[2]
[1,2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Corresponden E-mail; 06drinagisan@gmail.com

Abstrak

Penguatan wawasan kebangsaan penting dilakukan untuk menjaga pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan identitas bangsa di tengah berbagai tantangan sosial. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam mendorong penguatan wawasan kebangsaan melalui organisasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat wawasan kebangsaan organisasi masyarakat serta strategi kelembagaan yang dilakukan dengan instansi lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan wawasan kebangsaan dilakukan melalui sosialisasi, seminar, diskusi, dialog kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan politik dan demokrasi, serta pemberdayaan organisasi masyarakat. Penentuan sasaran dan bentuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan serta permasalahan masing-masing daerah masyarakat Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Kesbangpol juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, Densus 88 Polri, BNPT, FKPT, FKDM, dan FKUB. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, dan keterlibatan setiap pihak sesuai dengan bidangnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran pemerintah daerah dan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat wawasan kebangsaan di lingkungan organisasi masyarakat.
Kata kunci : Kesbangpol, Wawasan Kebangsaan, Organisasi Masyarakat, Kolaborasi.

Abstract

Strengthening national consciousness is essential for maintaining public understanding of the values of Pancasila, national unity, and national identity amidst various social challenges. In this context, the Agency for National Unity and Politics (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol) of Central Java Province plays a role in fostering this national consciousness through civil society organizations. This study aims to examine the efforts of the Central Java Province National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) in strengthening the national perspective (wawasan kebangsaan) among civil society organizations, as well as the institutional strategies implemented in collaboration with other agencies. The study utilizes a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed to provide an overview of the program's implementation. The findings indicate that efforts to strengthen national consciousness are carried out through outreach activities, seminars, discussions, national dialogues, the promotion of Pancasila ideology, political and democratic education, and the empowerment of civil society organizations. The selection of target groups and the format of activities are tailored to the specific needs and challenges of different communities within Central Java. In its implementation, the Kesbangpol also collaborates with various entities, such as the Education Office, the National Police's Densus 88, the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the Regional Counter-Terrorism Coordination Forum (FKPT), the Regional Early Detection Forum (FKDM), and the Religious Harmony Forum (FKUB). This collaboration is facilitated through communication, coordination, the division of tasks, and the involvement of each party according to their respective areas of expertise. This study is expected to provide insight into the role of local government and the importance of collaboration in strengthening national consciousness within civil society organizations.
Keywords: *National Unity and Politics Agency, National Awareness, Community Organizations, collaboration.*

Pendahuluan

Wawasan kebangsaan menjadi salah satu hal penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi informasi, masyarakat semakin

mudah menerima berbagai informasi serta pengaruh dari luar. Kondisi ini memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan ketika informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta atau mengandung pandangan yang dapat memicu perpecahan. Penyebaran hoaks, intoleransi, polarisasi, dan berkembangnya paham radikalisme merupakan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan (A dkk., 2025). Oleh karena itu, wawasan kebangsaan perlu dipahami bukan hanya sebagai pengetahuan tentang bangsa dan negara, melainkan juga sebagai dasar untuk membangun sikap toleransi, cinta tanah air, tanggung jawab, serta kesediaan menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Penguatan wawasan kebangsaan tidak dapat hanya mengandalkan pendidikan formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Salah satu pihak yang memiliki peran dalam bidang ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Melalui program pembinaan, sosialisasi, dialog, dan koordinasi dengan berbagai pihak, Kesbangpol dapat mendorong masyarakat untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. (Gani Wardhana dkk., 2024) membahas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah yang berkaitan dengan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pemeliharaan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayahnya.

Selain pemerintah, organisasi masyarakat juga memiliki posisi penting dalam mendukung penguatan wawasan kebangsaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, organisasi kemasyarakatan merupakan wadah yang dibentuk secara sukarela untuk menyalurkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta berpartisipasi dalam pembangunan. Keberadaan organisasi masyarakat dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial, memperkuat hubungan antaranggota masyarakat, dan mengembangkan nilai persatuan. Melalui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya, organisasi masyarakat juga berpeluang menerapkan nilai Pancasila, toleransi, dan cinta tanah air dalam lingkungan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wawasan Kebangsaan juga membuat kita lebih sadar akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan memahami wawasan kebangsaan, kita akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam proses pembangunan sosial dan politik bangsa. Partisipasi aktif ini sangat penting untuk menjaga demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Vikri, 2025)

Penelitian mengenai penguatan wawasan kebangsaan sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa konteks. (Sembiring, 2017) membahas program kerja Kesbangpol dan Linmas dalam pengembangan wawasan kebangsaan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian (Hartanti & Sunarso, 2024) mengkaji pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Yogyakarta. Sementara itu, penelitian (A dkk, 2025) menguraikan berbagai program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilakukan Bakesbangpol Jawa Barat, sekaligus menyoroti tantangan berupa polarisasi dan belum meratanya jangkauan program. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan. Namun, pembahasan mengenai strategi kelembagaan kesbangpol provinsi jawa tengah dalam penguatan wawasan kebangsaan pada organisasi kemasyarakatan masih perlu dikaji secara lebih khusus. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, penguatan wawasan kebangsaan tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau banyaknya peserta yang hadir. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah kesesuaian program dengan kebutuhan organisasi masyarakat, keterlibatan organisasi dalam kegiatan, serta kerja sama dengan instansi lain. Kesbangpol perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak agar program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Setiap pihak yang terlibat juga perlu memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga kegiatan dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. (Sulaiman, 2022), memandang bahwa setiap individu atau organisasi memiliki seperangkat fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem organisasi. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kerja sama, dan kontribusi dalam mencapai tujuan. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut berkaitan dengan bagaimana Kesbangpol menjalankan tugasnya serta melibatkan organisasi masyarakat dan instansi lain dalam penguatan wawasan kebangsaan.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan program setelah kegiatan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi, seminar, maupun dialog belum dapat secara langsung menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap peserta telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang tidak hanya memperhatikan jumlah kegiatan dan kehadiran peserta, tetapi juga tanggapan, pemahaman, serta penerapan nilai-nilai kebangsaan setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, perbedaan kebutuhan organisasi masyarakat, keterbatasan partisipasi, koordinasi antarpihak, dan tindak lanjut kegiatan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan membutuhkan proses pembinaan yang disesuaikan dengan sasaran, keterlibatan aktif organisasi masyarakat, serta kerja sama yang berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana peran Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dalam praktiknya.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori peran untuk memahami pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kesbangpol dalam penguatan wawasan kebangsaan. (Soekanto, 2017) menjelaskan peran berkaitan dengan kedudukan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kedudukan Kesbangpol diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, kerja sama, dan evaluasi program. Sementara itu, wawasan kebangsaan dipahami sebagai kesadaran mengenai identitas bangsa dan pentingnya menjaga persatuan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Trisno, 2024) menekankan pentingnya kesadaran generasi muda terhadap jati diri bangsa dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua konsep ini menjadi dasar untuk menganalisis peran Kesbangpol dan bentuk penguatan wawasan kebangsaan yang dilakukan bersama organisasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi kelembagaan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan wawasan kebangsaan pada organisasi masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana upaya Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan wawasan kebangsaan organisasi masyarakat di Jawa Tengah dan bagaimana strategi kolaborasi Kesbangpol dengan instansi lain dalam mendukung penguatan wawasan kebangsaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan yang menggabungkan upaya penguatan wawasan kebangsaan melalui organisasi

masyarakat dengan strategi kolaborasi antarlembaga. Penelitian tidak hanya menguraikan bentuk kegiatan yang dilaksanakan Kesbangpol, tetapi juga melihat proses perencanaan, penentuan sasaran, keterlibatan organisasi masyarakat, pembagian peran mitra, serta evaluasi pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya Kesbangpol dalam penguatan wawasan kebangsaan dan menganalisis strategi kolaborasi dengan instansi terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peran pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan program penguatan wawasan kebangsaan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam strategi kelembagaan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan wawasan kebangsaan organisasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan program, bentuk kegiatan, keterlibatan organisasi masyarakat, strategi kolaborasi dengan instansi lain, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi dan kegiatan yang berlangsung di lapangan berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan proses pelaksanaan program daripada pengukuran menggunakan angka atau perhitungan statistik.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, dengan lokasi pendukung pada organisasi masyarakat yang menjadi sasaran atau terlibat dalam kegiatan penguatan wawasan kebangsaan. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaian tugas Kesbangpol dengan fokus penelitian, yaitu penguatan wawasan kebangsaan dan pembinaan organisasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada bulan mei dan juni 2026 pada tahap observasi dan pada bulan september dan oktober 2026 pada tahap wawancara.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program penguatan wawasan kebangsaan. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Teknik ini digunakan agar informasi diperoleh dari orang-orang yang mengetahui, terlibat, atau memiliki pengalaman terkait program yang diteliti. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: (1) pejabat atau pegawai Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang memahami kebijakan dan program penguatan wawasan kebangsaan; (2) pegawai yang ada di bidang yang terlibat langsung dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan organisasi kemasyarakatan; (3) perwakilan instansi yang pernah bekerja sama dengan Kesbangpol dalam pelaksanaan program; (4) pengurus organisasi masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan (5) anggota organisasi masyarakat seperti FPK dan FKUB yang sering diajak berkolaborasi dan mengikuti kegiatan seputar wawasan kebangsaan. Organisasi masyarakat yang menjadi perhatian penelitian meliputi Fatayat dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Instrumen penelitian ini dengan pedoman observasi (Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan), wawancara (Wawancara dilakukan kepada informan untuk menggali informasi mengenai upaya

Kesbangpol, proses perencanaan dan pelaksanaan program, keterlibatan organisasi masyarakat, pola koordinasi dengan instansi terkait, serta kendala yang dihadapi), dan dokumentasi (dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang relevan, berupa foto kegiatan, laporan pelaksanaan, surat keputusan, materi sosialisasi, dan arsip lainnya). Data yang dikumpulkan kemudian difokuskan pada aspek utama, yaitu strategi Kesbangpol dalam penguatan wawasan kebangsaan organisasi masyarakat dan strategi kolaborasi dengan instansi lain.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan dalam Sugiyono (2019), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, informasi yang diperoleh dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar hubungan antartemuan dapat dipahami. Kesimpulan kemudian disusun berdasarkan hasil analisis dan diperiksa kembali dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Kesbangpol, instansi mitra, dan organisasi masyarakat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan informasi pada waktu yang berbeda juga dilakukan apabila diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan pihak Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, penguatan wawasan kebangsaan merupakan salah satu upaya untuk menjaga pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan identitas bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam melaksanakan program tersebut, Kesbangpol tidak memberikan kegiatan yang sama kepada seluruh organisasi masyarakat. Penentuan sasaran kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan tema, tujuan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berkaitan dengan upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku dan budaya. Sedangkan kegiatan mengenai kerukunan antarumat beragama melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan diharapkan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lapisan masyarakat Jawa Tengah.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, Kesbangpol melakukan perencanaan dengan melihat persoalan dan mengidentifikasi isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Perencanaan tersebut meliputi penentuan tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, serta pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Kesbangpol juga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi masyarakat dan instansi terkait agar kegiatan yang disusun sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diwujudkan mulai dari sosialisasi, seminar, diskusi, kampung bhinneka, Pemberdayaan potensi ormas, Seminar bela negara, pendidikan politik dan demokrasi bagi ormas, tokoh masyarakat dan perempuan, pembinaan ideologi Pancasila, hingga forum dialog kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen seperti pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan,

organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelajar. kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dilaksanakan sekitar dua kali dalam satu bulan. Materi yang disampaikan berkaitan dengan nilai- nilai Pancasila, persatuan, toleransi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode penyampaiannya dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, permainan peran, dan penggunaan media visual maupun digital. Keterlibatan organisasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan sebagai peserta, penyampaian pendapat, pemberian masukan, dan dukungan terhadap penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu contohnya adalah pelibatan FPK dalam kegiatan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi, termasuk kegiatan peringatan Sumpah Pemuda dan Festival Toleransi. Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar nilai-nilai kebangsaan tidak hanya diketahui, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan belum dapat langsung dijadikan bukti bahwa wawasan kebangsaan peserta telah mengalami perubahan. Untuk mengetahui hasilnya, diperlukan evaluasi dan tindak lanjut, Evaluasi merupakan tahapan yang diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program sedangkan Tindak lanjut diperlukan agar kegiatan penguatan wawasan kebangsaan tidak berhenti setelah seminar atau sosialisasi selesai dilaksanakan. Berdasarkan keterangan pihak Kesbangpol, evaluasi dapat dilakukan melalui pemantauan kegiatan, penilaian ketercapaian tujuan dan sasaran, pengamatan tingkat partisipasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pembinaan berikutnya. Tetapi keberhasilam program kegiatan tidak hanya melihat jumlah peserta atau banyaknya kegiatan, tetapi juga perubahan pemahaman, tanggapan, dan penerapan sikap nilai-nilai kebangsaan setelah kegiatan berlangsung. Dengan begitu, keberhasilan program dapat dinilai secara lebih menyeluruh.

Penguatan wawasan kebangsaan tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang pemerintah sebagai penyelenggara program, tetapi juga perlu memperhatikan pengalaman organisasi masyarakat sebagai pihak yang menerima pembinaan. Dalam penelitian ini, salah satu organisasi yang menjadi perhatian adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan hasil wawancara selaku anggota FPK, organisasi tersebut pernah dilibatkan dalam kegiatan Kesbangpol yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, pembinaan organisasi masyarakat, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Informasi mengenai kegiatan diperoleh melalui undangan dan komunikasi dari Kesbangpol kepada pengurus organisasi. Dari perspektif organisasi, keterlibatan dalam kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan mengenai persatuan, toleransi, serta kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Organisasi juga memiliki kesempatan menyampaikan masukan mengenai kebutuhan pembinaan dan permasalahan yang dihadapi melalui komunikasi maupun forum koordinasi. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Kesbangpol dengan organisasi masyarakat tidak hanya berupa penyampaian informasi satu arah. Organisasi masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Dari sisi manfaat, wawasan yang diperoleh melalui kegiatan pembinaan dapat menjadi bekal bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Nilai-nilai seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan membangun kerja sama tanpa membedakan latar belakang merupakan bentuk penerapan nilai kebangsaan yang relevan dalam kehidupan

organisasi. Namun, manfaat tersebut perlu dibedakan antara pemahaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan dan perubahan perilaku yang benar-benar telah diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan terhadap kegiatan organisasi setelah pembinaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam aktivitas nyata.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan program penguatan wawasan kebangsaan oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendukung meliputi adanya dasar regulasi dan kebijakan pemerintah, ketersediaan mitra strategis, kesamaan tujuan, dukungan pimpinan daerah, komunikasi yang baik, komitmen masing-masing lembaga, pembagian tugas yang jelas. Keberadaan berbagai forum seperti FPK dan FKUB juga memberikan kemudahan bagi Kesbangpol dalam menjangkau kelompok masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dari perspektif organisasi masyarakat, faktor pendukung lainnya adalah adanya undangan dan informasi kegiatan yang jelas, dukungan pengurus, kesesuaian materi dengan kebutuhan organisasi, serta kesempatan memperluas jaringan kerja sama. Komunikasi yang baik dengan Kesbangpol juga menjadi salah satu hal yang mendukung keterlibatan organisasi. Sementara itu, faktor penghambat yang disampaikan dalam hasil wawancara meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, luasnya wilayah Provinsi Jawa Tengah, ketidakpedulian sebagian kelompok sasaran terhadap isu kebangsaan, serta perkembangan penyebaran informasi dan paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan melalui media digital. Selain itu, dari sudut pandang organisasi masyarakat, kendala yang perlu diperhatikan mencakup keterbatasan waktu anggota, penyesuaian jadwal kegiatan, biaya transportasi, serta belum meratanya kesempatan seluruh anggota untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor penghambat tidak hanya berasal dari keterbatasan internal pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan kondisi organisasi masyarakat sebagai penerima program. Keterbatasan waktu dan kesempatan anggota, misalnya, dapat memengaruhi pemerataan penyampaian materi kepada seluruh anggota organisasi. Pelaksanaan program membutuhkan strategi yang mampu menyesuaikan kondisi organisasi, baik melalui penyampaian informasi yang lebih luas, pengaturan jadwal yang fleksibel, maupun kegiatan pembinaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan teori peran, menurut (Trisno, 2024) wawasan kebangsaan merupakan kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap jati diri bangsanya yang diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, masyarakat perlu memahami siapa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, memiliki kesadaran mengenai tujuan bersama, serta mampu menempatkan kepentingan bangsa dalam kehidupan bernegara. Penguatan wawasan kebangsaan dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya menanamkan pemahaman mengenai identitas bangsa, nilai-nilai Pancasila, persatuan, toleransi, cinta tanah air, serta penghargaan terhadap keberagaman. Jika dikaitkan dengan teori wawasan kebangsaan, keberhasilan penguatan wawasan kebangsaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan peserta dalam memahami materi, tetapi juga oleh kesediaan mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penguatan wawasan kebangsaan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian (Sembiring, 2017) mengenai program kerja Badan Kesbangpol dan Linmas dalam pengembangan wawasan kebangsaan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan

wawasan kebangsaan dilakukan melalui berbagai program, seperti sosialisasi, seminar, forum diskusi, dan pendidikan kebangsaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Persamaan kedua penelitian terletak pada bagaimana Kesbangpol dalam melaksanakan program penguatan wawasan kebangsaan melalui kegiatan edukatif dan pelibatan masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini memberikan perhatian lebih khusus pada strategi kelembagaan, pembinaan organisasi masyarakat, serta kolaborasi dengan instansi lain. Penelitian (Hartanti dan Sunarso, 2024) mengenai pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta juga menunjukkan pentingnya kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dialog kebangsaan, dan pelibatan tokoh masyarakat. Temuan penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa pembinaan wawasan kebangsaan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, penelitian (Candra, 2025) mengenai upaya Bakesbangpol Jawa Barat melalui program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menunjukkan pentingnya program pembinaan dalam menghadapi tantangan nasionalisme masyarakat. Penelitian tersebut juga memberikan perhatian terhadap tantangan pelaksanaan program dan jangkauan pembinaan. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memberikan penekanan pada hubungan kelembagaan antara Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, instansi mitra, dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan wawasan kebangsaan tidak hanya dilihat dari bentuk program, tetapi juga dari mekanisme pembinaan, koordinasi, pembagian peran, dan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai penerima program.

Program penguatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, membentuk sikap toleransi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan. Selain itu, nilai-nilai kebangsaan yang relevan dengan kehidupan organisasi meliputi penghargaan terhadap perbedaan pendapat, musyawarah, menjaga kerukunan, dan kerja sama tanpa membedakan latar belakang. Hal tersebut menunjukkan adanya manfaat pembinaan dari sisi pengetahuan dan pemahaman organisasi. Namun, berdasarkan data yang tersedia, perubahan perilaku organisasi secara menyeluruh belum dapat dipastikan. Informasi mengenai tambahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh anggota telah mengalami perubahan sikap atau peningkatan partisipasi. Untuk membuktikannya, diperlukan data observasi terhadap kegiatan organisasi, dokumentasi kegiatan lanjutan, serta keterangan yang lebih mendalam dari pengurus dan anggota organisasi. Dari sisi implementasi, terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan. Pada tingkat perencanaan, Kesbangpol telah menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan melibatkan berbagai mitra strategis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, luasnya wilayah jangkauan, serta perbedaan tingkat partisipasi organisasi masyarakat.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan seminar perlu diimbangi dengan pembinaan yang lebih berkelanjutan. Hal ini penting karena keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan dan peserta, tetapi juga dari sejauh mana organisasi masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan setelah mengikuti pembinaan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat hubungan antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kesbangpol perlu memastikan bahwa organisasi masyarakat tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga memperoleh ruang untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan hasil pembinaan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa peran Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

dalam penguatan wawasan kebangsaan telah diwujudkan melalui program pembinaan, pemberdayaan organisasi masyarakat, dan kolaborasi antarlembaga. Akan tetapi, optimalisasi program masih membutuhkan peningkatan partisipasi organisasi, evaluasi berbasis dampak, serta tindak lanjut yang berkelanjutan agar penguatan wawasan kebangsaan dapat diwujudkan secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan wawasan kebangsaan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa: Temuan pertama, temuan substantif penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menjalankan peran dalam penguatan wawasan kebangsaan melalui berbagai program, antara lain sosialisasi, seminar, dialog kebangsaan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat, penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kampung Bhinneka, Nge-Camp Kebangsaan, serta Festival Ormas. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh kolaborasi dengan berbagai instansi dan forum terkait, seperti Dinas Pendidikan, BNPT, Densus 88, FKPT, FKDM, FKUB, dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan organisasi masyarakat, khususnya FPK, memberikan ruang bagi anggota organisasi untuk memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, persatuan, toleransi, dan keberagaman. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman belum sepenuhnya dapat dijadikan bukti adanya perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi organisasi secara menyeluruh. Pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, luasnya wilayah jangkauan, serta perbedaan tingkat partisipasi organisasi masyarakat.

Kedua, implikasi terhadap pelaksanaan program Kesbangpol adalah perlunya penguatan pengelolaan program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Program pembinaan tidak cukup hanya berorientasi pada terselenggaranya kegiatan dan jumlah peserta, tetapi perlu diarahkan pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan oleh organisasi masyarakat. Kesbangpol juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi mitra melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas agar setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Selain itu, organisasi masyarakat perlu ditempatkan bukan hanya sebagai peserta kegiatan, melainkan sebagai mitra aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, memberikan masukan, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.

Ketiga, rekomendasi strategis untuk pengembangan program pembinaan organisasi kemasyarakatan meliputi beberapa hal. Kesbangpol perlu mengembangkan program pembinaan yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing organisasi. Materi pembinaan sebaiknya tidak hanya disampaikan melalui seminar dan sosialisasi, tetapi juga melalui diskusi partisipatif, pendampingan, praktik kegiatan sosial, dan forum pertukaran pengalaman antarorganisasi. Selanjutnya, perlu dikembangkan sistem evaluasi berbasis hasil dan dampak dengan memperhatikan peningkatan pemahaman, perubahan sikap toleransi, serta keterlibatan organisasi dalam kegiatan kebangsaan. Kesbangpol juga perlu memperluas jangkauan pembinaan melalui pemanfaatan media digital, memperkuat kemitraan lintas sektor, dan meningkatkan pemerataan kesempatan organisasi masyarakat untuk mengikuti program. Dengan strategi tersebut, pembinaan organisasi

kemasyarakatan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan formal, tetapi mampu mendorong penerapan nilai-nilai kebangsaan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A, H. C., P, F. N., A, S. E., Setiawibawa, R., Uksan, A., & Sagala, P. (2025). *Upaya Bakesbangpol Jawa Barat untuk Meningkatkan Rasa Nasionalisme Masyarakat melalui Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.* JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(11), 13025–13032. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9597.

Gani Wardhana, A. F., Hakiki, Y. R., & Nurcahyani Rahman, D. F. (2024). *Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(1), 76–98. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art4.

Hartanti, E., & Sunarso, S. (2024). *Pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di kota Yogyakarta oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.* AGORA, 13(1), 046–056. https://doi.org/10.21831/agora.v13i1.22112.

Huda, (2021). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Bandung Melalui Program Jamboree Kebangsaan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). http://repository.upi.edu/id/eprint/68610.

Lagata, Tahir, Tohopi. (2025). *Tata Kelola Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Gorontalo*. Jurnal Managemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MGOs5rkAAAAJ&citation_for_view=MGOs5rkAAAAJ:a9T7VOCCHC.

Sulaiman, M., Rosiyan, N. R., Untari, D., Rachmawati, R., & Trianggoro, C. (2022). *Peran Pustakawan Data dalam Meningkatkan Literasi dan Kapasitas Pengelolaan Data Penelitian bagi Komunitas Penelitian dan Profesional Informasi di Indonesia*. Media Pustakawan, 29(3), 241–253.

Sembiring, Isdaryanto, Suhardiyanto. (2017). Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Unnes Political Science Journal. https://journal.unnes.ac.id/sju/upsj/article/view/20104/9480.

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Trisno, B. (2024). *Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan Dan Pancasila Di Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraaan. https://ojs.unm.ac.id.

Vikri, A. (2025). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda di Kota Jambi*. (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22944.